

PERANAN PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN DALAM MENINGKATKAN SEKTOR PERINDUSTRIAN

Sonny M. Ikhsan M

Dosen Ekonomi pada FE Universitas Almuslim Bireuen - Aceh
email : sonnyikhsan@yahoo.com

A b s t r a k

Sektor perindustrian bagian dari faktor pendukung pembangunan ekonomi di Kabupaten Bireuen. Peranan Pemerintah Daerah sangat diperlukan untuk meningkatkan sektor perindustrian agar dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sejauhmana peranan ini dapat diimplementasikan dan memperkecil kendala dalam pengembangan sektor perindustrian di Kabupaten Bireuen akan dapat berpengaruh pada peningkatan sektor ini, sebagai upaya peningkatan ekonomi rakyat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perananan pemerintah Kabupaten Bireuen dalam sektor perindustrian selama ini masih terkendala oleh berbagai permasalahan, yaitu modal yang terbatas, tidak adanya legalitas usaha, usaha pembukaan pasar baru, skill sumber daya manusia yang tidak mendukung, tidak adanya studi kelayakan pada setiap pembangunan unit usaha, aparatur pemerintah yang kurang kompeten untuk bidang usaha. Sehingga peranan yang seharusnya dilakukan belum nampak maksimal, sehingga belum memberikan nilai ekonomis bagi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bireuen.

Kata kunci : Sektor Perindustrian, Pemerintah Daerah.

1. Pendahuluan

Perkembangan dan pertumbuhan ekonomi saat ini menjadi perhatian serius oleh berbagai pihak terutama Pemerintah yang memiliki kemampuan dan otoritas yang bertanggungjawab terhadap kesejahteraan hidup masyarakat. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi merupakan tujuandan indikator utama kesejahteraan masyarakat.

Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah dengan segala upaya melakukan berbagai cara yang dapat menggerakkan roda perekonomian masyarakat, baik dengan mengandalkan sumber daya yang ada di dalam maupun permodalan yang ditarik dari luar untuk diinvestasikan, sehingga dengan masuknya investor akan terbangun berbagai industri yang bermanfaat bagi masyarakat.

Dalam perkembangannya, pertumbuhan di sektor perindustrian sangat dipengaruhi oleh peranan pemerintah di daerah. Hal ini terjadi seiring dengan berlakunya perundang-undangan yang mengatur pembagian kekuasaan antara pusat dan daerah atau yang lebih dikenal dengan otonomi daerah. Sehingga peranan pemerintah daerah menjadi lebih dominan dibandingkan dengan keadaan sebelumnya yang lebih sentralistik.

Untuk kondisi saat ini, perkembangan perekonomian masyarakat di Kabupaten Bireuen dan daerah lainnya di Provinsi Aceh diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, khususnya yang tersebut dalam bab ke XXII tentang perekonomian, yang menjelaskan bahwa Pemerintah Aceh mempunyai kewenangan yang sangat luas untuk meningkatkan

perekonomiannya termasuk dengan mengembangkan sektor-sektor industri.

Kabupaten Bireuen merupakan kabupaten yang sangat berpotensi untuk berkembang. Hal ini bisa terjadi karena Kabupaten Bireuen didukung oleh beberapa faktor yaitu terletak sangat strategis di Provinsi Aceh dan Sumber Daya Alam yang tersedia dalam jumlah yang besar, yang apabila dimanfaatkan secara maksimal akan sangat mempengaruhi bagi pertumbuhan ekonomi dan mensejahterakan masyarakat. Dengan letak geografis yang berada di jalur transportasi antar Kabupaten di Provinsi Aceh menyebabkan Kabupaten Bireuen bisa berkembang dengan cepat. Letak Kabupaten Bireuen yang berbatasan dengan Kabupaten Bener Meriah, Pidie Jaya dan Aceh Utara memberikan keuntungan tersendiri bagi perekonomian masyarakat. Hal ini bisa memberi pengaruh secara langsung bagi perekonomian masyarakat, karena masyarakat memiliki kemudahan dalam menjual berbagai hasil alam yang mereka hasilkan.

Kabupaten Bireuen adalah kabupaten yang mempunyai sumber daya alam yang melimpah, baik di sektor pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan. Akan tetapi, sumber daya alam yang ada selama ini belum bisa dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat. Hal ini terjadi karena berbagai faktor seperti kurangnya sumber daya manusia, fasilitas pengolahan atau industri untuk mengolah berbagai hasil alam yang tidak tersedia, kondisi politik dengan akibat konflik yang baru memasuki masa damai, serta kondisi sosial masyarakat terhadap kehadiran berbagai pihak yang akan mengelola dan mengolah sumber daya alam yang ada di masyarakat.

Selain itu, Industri di Kabupaten Bireuen juga dipengaruhi berbagai faktor seperti kekayaan alam yang dimiliki daerah tersebut yang akan diolah oleh Industri serta tingkat keahlian masyarakat yang menjadi tenaga kerja untuk mengolah menjadi produk-produk yang mempunyai nilai ekonomi. Namun dapat dipahami, tidak semua daerah mempunyai kekayaan alam, hal ini akan menyebabkan tingkat pertumbuhan dan perkembangan industri di daerah tidak sama.

Selama beberapa tahun terakhir Pemerintah Kabupaten Bireuen sudah berusaha untuk menjalankan suatu konsep yang mengarah

kepada pembangunan ekonomi masyarakat dari sektor perindustrian. Hal ini terjadi karena, dengan adanya perkembangan pada sektor perindustrian akan memberikan pengaruh positif secara langsung kepada pembangunan ekonomi di Kab Bireuen. Salah satu cara mengurangi pengangguran yaitu dengan terciptanya lapangan kerja di sektor industri yang dapat memberikan pendapatan kepada keluarga dan masyarakat secara langsung dan tidak langsung sehingga roda perekonomian masyarakat dapat berjalan menjadi lebih baik.

Dalam perkembangannya, di Kabupaten Bireuen terdapat beberapa sektor industri yang mulai tumbuh dan berkembang, yang terdiri atas industri kecil, menengah maupun industri besar. Untuk meningkatkan perkembangan industri tersebut diperlukan peranan pemerintah, terutama Pemerintah Daerah Kabupaten Bireuen secara langsung untuk memberikan dukungan agar industri yang ada dapat berkembang menjadi bertambah maju.

Perkembangan sektor perindustrian di Kabupaten Bireuen juga dipengaruhi oleh *revitalisasi* (tata kelola) berbagai pihak yang mempunyai kemampuan di bidang industri. Sektor perindustrian tidak akan bisa berkembang apabila keahlian dari para pengelola yang diberi kepercayaan oleh pemerintah di bidang perindustrian tidak memiliki sumber daya manusia yang memadai.

Dalam dinamika sosial ekonomi, perkembangan informasi dan pengetahuan sangat diperlukan agar setiap industri yang akan dibangun dan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sehingga industri yang dibangun tersebut dapat berkembang karena produk-produk yang dihasilkan sesuai dengan selera masyarakat.

Dalam kondisi tertentu, Pemerintah Kabupaten Bireuen juga harus memperhatikan faktor lokasi dan potensi daerah yang akan dibangun suatu pusat perindustrian agar tidak memberikan efek negatif kepada masyarakat yang ada di sekitar lokasi tersebut.

Peranan Pemerintah Kabupaten Bireuen dalam sektor industri telah dijalankan dalam beberapa waktu yang lalu. Hal ini dimaksudkan karena industri saat ini telah memberikan kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Salah satu program pemberdayaan ekonomi rakyat adalah meningkatkan kemampuan masyarakat

kat ekonomi lemah di pedesaan dan perkotaan melalui bantuan modal, penciptaan lapangan kerja dan kesempatan berusaha. Oleh karena itu perlu menggerakkan ekonomi rakyat dengan membangun sarana dan prasarana ekonomi yang mendukung peningkatan kesejahteraan dan tingkat pendapatan yang optimal, sehingga dapat dirasakan tingkat kemakmuran yang adil dan merata bagi masyarakat.

Berdasarkan urian di atas maka tulisan ini akan membahas “Bagaimana Peranan Pemerintah Kabupaten Bireuen dalam meningkatkan sektor perindustriannya”.

2. Landasan Teoritis

a. Pengertian Pemerintah Daerah.

Pengertian Pemerintah Daerah untuk Provinsi Aceh harus diperhatikan secara khusus, karena telah diatur dalam suatu perundang-undangan baru, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang merupakan landasan dasar penyelenggaraan dalam pelaksanaan pembangunan di Aceh.

Dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh menjelaskan pengertian, kedudukan dan wewenang Pemerintah Daerah. Berdasarkan perjalanan ketatanegaraan RI, Aceh merupakan satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa terkait dengan salah satu karakter khas sejarah perjuangan masyarakat Aceh yang memiliki ketahanan dan daya juang yang tinggi.

Dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tersebut menjelaskan bahwa Aceh merupakan daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah di daerah terbagi atas dua tingkatan, Pemerintah Daerah tingkat I yang berada di tingkat provinsi dan Pemerintah daerah tingkat II yang terdiri atas Kab/Kota. Dalam Undang-Undang tersebut juga dijelaskan pengertian dari Kabupaten/kota yaitu bagian dari daerah provinsi sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur

dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati/Walikota.

b. Peranan Pemerintah daerah dalam perencanaan dan pembangunan.

Dalam Bab XX pasal 141 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh menjelaskan bahwa perencanaan pembangunan Aceh/Kabupaten/Kota disusun secara komprehensif sebagai bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, perencanaan dan pembangunan yang dilakukan pemerintah daerah harus dilakukan dengan memperhatikan: 1) Nilai-nilai Islam, 2) Sosial Budaya, 3) Berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, 4) Keadilan dan pemerataan, 5) Kebutuhan

Dalam pasal 142-143 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, dijelaskan bahwa pemerintah mempunyai kewenangan menetapkan norma, standar, dan prosedur penata ruang dalam penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh dan Kabupaten/kota dengan memperhatikan pembangunan berkelanjutan dan kelestarian fungsi lingkungan hidup.

c. Tujuan Pembangunan Nasional

Pembangunan nasional bertujuan membangun manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur, yang merata baik material maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tujuan pembangunan nasional adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam hidupnya, dalam rangka untuk mensejahterakan masyarakat, pemerintah diharapkan melakukan pembentukan modal dengan demikian merupakan kunci menuju pembangunan.

Investasi adalah menjadi tanggung jawab pemerintah untuk melakukan investasi yang paling menguntungkan bagi masyarakat. Investasi harus dilakukan pada bidang dan arah yang mempunyai produktivitas marginal sosial yang tinggi seperti sektor industri.

Beberapa kriteria investasi menurut Sadli (2001:101), adalah sebagai berikut :

- 1) Investasi harus diarahkan pada penggunaan yang paling produktif sehingga rasio output (*current Output*) terhadap investasi menjadi maksimum atau sebaliknya rasio modal output menjadi minimal.
- 2) Investasi harus dilakukan terhadap proyek yang akan memanfaatkan buruh secara maksimum. Proyek investasi adalah proyek yang dirancang paling banyak menggunakan bahan baku dalam negeri
- 3) Proyek investasi harus dapat menghasilkan barang yang memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dan meningkatkan ekonomi eksternal lebih luas
- 4) investasi harus diarahkan pada industri yang menghemat devisa dan mengurangi beban neraca pembayaran serta maksimum rasio barang ekspor terhadap investasi
- 5) Proyek investasi harus dapat memperbaiki distribusi pendapatan nyata.

Sektor industri mempunyai peran yang cukup besar dalam meningkatkan ekspor migas maupun ekspor non migas, penyedia lapangan kerja yang pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Hal ini dapat kita lihat bahwa perkembangan industri telah mampu merombak struktur ekonomi yang tidak seimbang karena terlalu bercorak pertanian kearah struktur ekonomi yang lebih kokoh dan seimbang antara sektor pertanian dan industri.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka mempunyai berbagai alasan untuk membangun sektor industri yang lebih tangguh dengan tujuan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi serta memperkokoh perekonomian nasional.

d. Pengertian Perekonomian

Perekonomian merupakan kegiatan di bidang ekonomi yakni bagian dari landasan pembangunan nasional, yaitu : Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara

dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. (Sadli; 2001:24)

Berdasarkan batasan diatas dapat dijelaskan bahwa, perekonomian negara harus dikembangkan ke arah perekonomian yang berkeadilan dan berdaya saing yang tinggi, demokrasi ekonomi harus diwujudkan untuk memperkokoh struktur usaha nasional. Usaha nasional harus dikembangkan sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan dalam sistem ekonomi, meningkatkan usaha-usaha kecil masyarakat, menyediakan sarana dan prasarana yang memadai, sehingga perekonomian meningkat seiring dengan peningkatan jumlah penduduk.

e. Pembangunan Ekonomi

Pembangunan ekonomi merupakan kemajuan dan perbaikan di bidang ekonomi, yang membawa perbaikan dan kemajuan dalam kehidupan masyarakat dalam melakukan aktivitas di bidang pembangunan (Samuelson, 2003:142). Dalam rangka mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi serta manfaat pembangunan ekonomi dapat dirasakan oleh masyarakat, maka perlu disediakan berbagai fasilitas, seperti jalan, bangunan, penerangan dan lain sebagainya, sehingga pada akhirnya kegiatan masyarakat tidak terhambat. Dengan meningkatnya usaha ekonomi masyarakat maka turut mempengaruhi meningkatnya pertumbuhan ekonomi di suatu daerah. Menurut Kurtz (2002:39) bahwa : “untuk mengejar laju pertumbuhan ekonomi perlu diusahakan pembinaan dan bantuan fasilitas dari pemerintah dan mendukung usaha-usaha produktif, guna tercapainya kesejahteraan masyarakat, sehingga pembangunan ekonomi dapat bermanfaat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Sartika (2003:45) kebijakan-kebijakan pokok pemerintah yang bersifat instrumental bagi terciptanya berbagai kondisi pokok yang sesuai bagi pertumbuhan ekonomi antara lain :

- 1) Peraturan-peraturan resmi dan ketentuan perundang-undangan yang memadai.
- 2) Fasilitas-fasilitas berupa informasi guna menunjang pembangunan ekonomi.
- 3) Keringanan pajak.
- 4) Bantuan-bantuan keuangan.
- 5) Struktur-struktur lembaga pengembangan swadaya yang melaksanakan secara

efisien tugas-tugas yang mendukung dan melindungi kegiatan ekonomi masyarakat.

Untuk mempercepat pembangunan ekonomi suatu daerah, maka perlu diberikan berbagai kemudahan kepada masyarakat dalam meningkatkan kegiatan perekonomian, terutama tersedianya berbagai fasilitas yang mendukung secara langsung yang bermanfaat bagi masyarakat.

Pembangunan ekonomi akan berhasil apabila telah menggunakan sumber daya dan memanfaatkan fasilitas, baik sarana dan prasarana yang tepat dan memadai. Menurut Mulyadi (2003:166) "Pembangunan ekonomi merupakan suatu proses yang berlangsung dalam jangka panjang, maka penggunaan sarana dan prasarana serta sumber daya secara optimal harus memperhitungkan dinamika, baik kualitas maupun kuantitas, komposisi pemanfaatan sarana dan prasarana juga mempengaruhi pembangunan ekonomi".

Pembangunan merupakan suatu proses perubahan yang direncanakan dalam upaya meningkatkan kualitas hidup, dan ekonomi suatu bangsa. Upaya tersebut menyangkut usaha-usaha dalam meningkatkan pendapatan perkapita. Pengembangan produktivitas tenaga kerja, mengembangkan industri, sumber daya alam, pemberdayaan, kesempatan, pemerataan kesejahteraan, kesempatan berusaha yang baik, peningkatan kesejahteraan masyarakat serta peningkatan kualitas sumber daya manusia harus mampu diwujudkan, sehingga tujuan pembangunan dapat dilaksanakan seperti yang telah direncanakan.

Berkaitan dengan tujuan pembangunan ekonomi, menurut Samuelson (2003:271), pertumbuhan ekonomi mempunyai tiga unsur penting, yaitu :

1. Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu proses, artinya suatu kegiatan berlangsung secara terus-menerus dan mempunyai kaitan dengan bidang-bidang yang lain.
2. pertumbuhan ekonomi merupakan usaha untuk menaikkan output perkapita. Dalam hal ini terdapat dua variabel yang mempengaruhi output perkapita, yaitu pendapatan dan jumlah penduduk. Untuk meningkatkan output perkapita, kenaikan pendapatan harus lebih tinggi dari kenaikan jumlah penduduk.
3. Kenaikan output perkapita harus berlangsung dalam jangka waktu yang panjang.

Pembangunan ekonomi bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat yang menyebabkan terjadinya perubahan menuju perbaikan struktur sosial, sikap mental dan lembaga nasional, sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap kemakmuran suatu daerah.

Pembangunan ekonomi merupakan kemajuan dan perbaikan di bidang ekonomi yang membawa perbaikan dan kemajuan dalam kehidupan masyarakat. Kemajuan pembangunan ekonomi ada yang berdampak positif dan ada yang berdampak negatif.

a). Dampak positif pembangunan ekonomi

Dampak positif pembangunan ekonomi merupakan satu gejala yang mampu meningkatkan arah pembangunan ekonomi kepada struktur yang lebih baik, meningkat dan dapat berkembang disuatu daerah. Adapun dampak ekonomi yang bersifat positif menurut Siswanto (2002:143), antara lain adalah :

- 1) Peningkatan kegiatan ekonomi yang menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat, meningkatnya pembangunan ekonomi dapat mengurangi pengangguran.
- 2) Pembangunan ekonomi dapat meningkatkan pendapatan masyarakat secara keseluruhan.
- 3) Pembangunan ekonomi dapat membawa perubahan pada struktur ekonomi.
- 4) Pembangunan ekonomi menciptakan pemerataan pendapatan dan pemerataan kesempatan kerja.

Meningkatnya pembangunan ekonomi dapat dilihat salah satunya berkembangnya berbagai sektor perekonomian, seperti sektor jasa, perdagangan dan sektor pertanian dan industri. Sektor industri menjadi andalan disamping sektor pertanian dan jasa, karena sektor industri dapat menciptakan pilihan-pilihan ekonomi yang lebih banyak bagi masyarakat. Selain dari dampak positif di atas, pembangunan ekonomi dari sektor perindustrian juga menciptakan pemerataan pendapatan dan peluang kerja, mengurangi kesenjangan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

b). Dampak Negatif

Dampak negatif pembangunan ekonomi dari sektor perindustrian adalah akibat yang ditimbulkan bagi penduduk di lokasi tempat

industri tersebut berada, dampak negatif tersebut terjadi akibat adanya kegiatan perindustrian yaitu polusi dan kerusakan lingkungan. Menurut Siswanto (2002:143), menjelaskan dampak negatif pembangunan di sektor perindustrian, adalah :

- 1) Adanya pabrik-pabrik yang beroperasi dapat menimbulkan gangguan kepada penduduk di sekitarnya berupa polusi, sehingga dapat mengganggu ketentraman penduduk.
- 2) Pabrik dapat menimbulkan polusi limbah, bahkan jika ditingkatkan produktivitasnya dapat meningkatkan polusi yang berlebihan. Gangguan tersebut menimbulkan berbagai penyakit bagi masyarakat.
- 3) Lingkungan industri dapat menimbulkan kerusakan lingkungan seperti lingkungan tanah, sumber mata air tercemar, dan tanah pertanian menjadi rusak. Kerusakan ini sangat merugikan penduduk karena tanah pertanian yang tadinya subur menjadi tanah yang tidak dapat dinikmati dan terjadinya pencemaran air bersih menimbulkan penyakit dan merusak ekosistem.

Untuk menghindari dampak negatif sebagaimana tersebut di atas, para pelaku ekonomi, termasuk pemerintah harus ikut bertanggung jawab atas kelestarian lingkungan dan terpeliharanya ekosistem. Pranoto (2001:77) menjelaskan bahwa "Usaha melestarikan lingkungan agar tidak berdampak negatif terhadap pembangunan ekonomi adalah mengusahakan penggunaan alat-alat yang sangat sedikit mengeluarkan zat perusak, hemat dan mengusahakan alat-alat yang efisien dalam faktor produksi".

Menurut Samuelson (2003:143), hasil pembangunan yang dapat dirasakan oleh masyarakat antara lain :

- 1) Peningkatan Kegiatan Ekonomi yang dapat menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat.
- 2) Pembangunan ekonomi meningkatkan pendapatan masyarakat secara menyeluruh.
- 3) Pembangunan ekonomi membawa struktur pada perubahan ekonomi.
- 4) Pembangunan ekonomi menciptakan pemerataan pendapatan masyarakat.
- 5) Pembangunan ekonomi meningkatkan kesejahteraan rakyat.

2.1 Pengertian Industri.

Menurut Undang-Undang RI No. 5 tahun 1984 Pasal 1 tentang perindustrian, "definisi industri adalah: kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan/atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekrutan industri".

Secara umum pengertian industri merupakan gabungan dari beberapa perusahaan yang memproduksi suatu barang dan jasa dalam proses input yang sama untuk menghasilkan output yang berbeda untuk kebutuhan manusia.

Sadli (2001:15) menjelaskan bahwa : "Industri merupakan kumpulan dari perusahaan-perusahaan atau firma yang memproduksi suatu barang yang serupa. Industri tidak meliputi perusahaan yang memproduksi barang-barang yang sama tapi meliputi yang memakai bahan mentah yang sama serta mempunyai proses yang sama". Sedangkan Prathama, S (2001:193) menyatakan bahwa : "Industri merupakan usaha-usaha produktif terutama di bidang tertentu yang menyelenggarakan jasa-jasa misalnya transportasi dan perhubungan yang menggunakan modal dan tenaga kerja". Pengertian industri kecil sebagaimana yang dikemukakan oleh Sofyan Assauri (2004:79) : "Industri kecil adalah sebagai usaha yang proses produksinya ada perubahan bentuk atau sifat. Dalam proses ini faktor manusia dan kalkulasinya lebih dari pada faktor alam.

Untuk meningkatkan pembangunan ekonomi perlu dikembangkan sektor industri, baik industri kecil, menengah dan besar sehingga mampu berperan meningkatkan pendapatan perkapita masyarakat dan mengurangi pengangguran dengan terciptanya lapangan kerja, sehingga dapat memberikan kontribusi yang besar dalam pembangunan ekonomi. Dalam pengertian dasar (filsafat) makna industri yang sejati adalah kegiatan ekonomi yang mencakup keseluruhan aspek, dari proses produksi sampai meraih laba dari penjualan produk, baik jasa atau barang yang dihasilkan.

Dalam pengertian bangsa Indonesia, industri secara umum adalah kelompok bisnis tertentu yang memiliki teknik dan metode yang sama dalam menghasilkan laba. Misalnya industri musik, industri mobil atau industri

ternak. Istilah industri juga digunakan bagi suatu bagian produksi ekonomi yang terfokus pada proses manufakturisasi tertentu yang harus memiliki permodalan yang besar sebelum bisa meraih keuntungan. Pengertian industri dalam bahasa Indonesia adalah suatu segmen aktifitas dalam kegiatan ekonomi, yang terkait dengan produksi barang atau jasa yang didukung dengan kemajuan teknologi.

2.2 Klasifikasi Industri.

Industri terbagi atas tiga tingkatan, yaitu industri besar, menengah, dan industri kecil. Pembagian ini didasarkan pada jumlah buruh yang dipekerjakan dan besarnya modal yang digunakan. Menurut Prathama, S (2001:203) maupun Hidayat (2001 : 45) mengkategorikan industri adalah sebagai berikut :

- a. Industri besar adalah perusahaan industri yang mempekerjakan buruh 100 orang atau lebih.
- b. Industri menengah adalah perusahaan-perusahaan industri yang mempekerjakan buruh/tenaga kerja 20 - 99 orang.
- c. Industri kecil adalah semua perusahaan industri yang mempekerjakan buruh/tenaga kerja 5 - 19 orang pekerja.
- d. Industri kerajinan adalah perusahaan-perusahaan yang mempekerjakan buruh/tenaga kerja 1 orang sampai dengan 4 orang pekerja.

Batasan mengenai skala usaha menurut BPS (2005:11), yaitu berdasarkan kriteria jumlah tenaga kerja, mulai dicobakan di lingkungan Depperindag, yaitu: Industri mikro: 1-4 orang, Industri kecil: 5-19 orang, dan Industri menengah : 20 - 99 orang .

2.3 Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Perkembangan Industri.

Proses produksi adalah usaha yang dapat menambah manfaat dan penciptaan faedah baru yang dilaksanakan dalam suatu perusahaan, yang kesemuanya itu digunakan untuk meningkatkan kegunaan suatu barang dan jasa. Menurut Prathama, S (2001 :59) dinyatakan bahwa : "Produksi adalah setiap tindakan yang menciptakan atau menambah faedah/manfaat.

Perkembangan industri sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor produksi dapat berupa barang-barang, alat-alat atau manusia yang digunakan untuk menghasilkan barang atau meningkatkan kegunaan pada barang.

Prathama (1995 : 66-67) menyatakan faktor-faktor produksi terdiri dari :

1. Faktor produksi alam
Yaitu segala sesuatu yang disediakan oleh alam yang dapat dimanfaatkan manusia dalam usahanya mencapai kemakmuran.
2. Faktor produksi tenaga kerja
Yaitu segala sesuatu kegiatan manusia, baik jasmani maupun rohani yang ditujukan untuk produksi.
3. Faktor produksi modal
Yaitu alat atau barang yang dihasilkan dan dapat digunakan untuk menghasilkan barang selanjutnya. Modal tidak harus berupa uang tetapi dapat berupa barang yang produksi. Fungsi modal dalam ekonomi untuk menghasilkan dan meningkatkan atau memperluas produksi. Semakin banyaknya modal digunakan dalam produksi semakin banyak pula barang yang dapat dihasilkan.
4. Faktor produksi pengusaha
Yaitu kemampuan yang dimiliki oleh seseorang atau beberapa orang untuk menyatukan segala faktor produksi yang ada, serta mengendalikan usaha itu dalam mencapai laba.

Faktor produksi pengusaha adalah kemampuan yang dimiliki oleh seseorang atau beberapa orang untuk menyatukan segala faktor produksi yang ada, serta mengendalikan usaha itu dalam mencapai keuntungan dan pengembangan produksi serta menerapkan penemuan-penemuan baru dan berani menanggung resiko. Faktor-faktor ini sangat menentukan dalam usaha untuk meningkatkan dan memperlancar proses produksi.

Boone dan Kurt, (2002:105) menyatakan seorang pengusaha akan berhasil bila memiliki 11 karakteristik, yakni Visi, Tingkat energi tinggi, Keinginan untuk berhasil, Rasa percaya diri dan optimis, toleransi terhadap kegagalan, Kreativitas, Toleransi terhadap ketidakpastian, Pengendalian internal yang baik, Menepati janji dan dapat dipercaya, Saling membantu, dan Menghargai karyawan dan menghargai milik orang lain.

Faktor produksi diatas adalah merupakan faktor yang berpengaruh secara langsung dalam proses produksi. Apabila faktor ini diabaikan maka kegiatan produksi akan terhenti. Untuk meningkatkan industri kecil diperlukan pembinaan dan penyuluhan-penyuluhan dari industri besar, serta peran

pemerintah daerah merupakan salah satu faktor yang penting, baik dalam penyediaan pinjaman modal, maupun sarana dan prasarana sehingga industri kecil mampu berkembang sebagaimana yang diharapkan.

2.4 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perkembangan Ekonomi Di Daerah

Pendapatan nasional perkapita ditentukan oleh kenaikan pendapatan nasional perkapita dan jumlah penduduk. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan ekonomi di daerah menurut Siswanto (2002:140) yaitu :

1. Kualitas Penduduk Sebagai Tenaga Kerja
Jumlah penduduk sebagai sumber daya manusia yang bekerja di sektor-sektor industri yang memproduksi barang sangat menentukan dalam melaksanakan pembangunan. Semakin tinggi kualitas penduduk maka akan semakin meningkat pula produktivitasnya. Siswanto (2002:141), menjelaskan bahwa “penduduk terdidik, terampil dan memiliki keahlian merupakan penduduk yang berkualitas dan mampu menyumbangkan tenaga dalam kegiatan pembangunan.
2. Sistem Sosial Masyarakat
Dukungan pemerintah daerah merupakan salah satu faktor dalam pembangunan ekonomi di daerah. memiliki keahlian merupakan penduduk yang berkualitas dan mampu menyumbangkan tenaga dalam kegiatan pembangunan. Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan perekonomian yang dilakukan oleh pemerintah daerah, diperlukan dukungan dari masyarakat. Sikap positif ini diwujudkan dengan berpartisipasi dalam pembangunan, misalnya mau bekerja keras, menerima transformasi perkembangan suatu daerah dan ikut serta dalam pembangunan bagi masyarakat di daerah tersebut. Sikap seperti ini menurut Notoatmodjo (2004:87) merupakan respon evaluatif seseorang pada posisi mendukung atau tidak mendukung. Sikap dikatakan sebagai respon stimulus yang menghendaki timbulnya reaksi individual. Respon evaluatif berarti respon yang dinyatakan sebagai sikap yang didasari oleh proses evaluasi dalam diri individu yang kemudian mengkristal sebagai potensi reaktif terhadap pengamatan dan dukungan.

3. Modal dan Teknologi
Modal, baik berupa barang maupun uang merupakan faktor penting dalam pembangunan, dengan tersedianya modal yang cukup akan menyebabkan terjadinya kelancaran dalam pembangunan ekonomi di daerah. Karena barang modal merupakan faktor yang ikut menentukan pembangunan dan produktivitas suatu sektor industri. Teknologi sangat membantu usaha peningkatan produksi, kenaikan produksi suatu sektor perindustrian menggambarkan adanya pembangunan ekonomi di daerah tempat industri tersebut berdiri, sehingga mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan ekonomi di daerah.
4. Sumber Daya Alam
Sumber daya alam ikut mempengaruhi perkembangan dan pertumbuhan ekonomi di sektor perindustrian, karena sumber daya alam sebagai sumber daya ekonomi memberikan sumbangan pada pendapatan nasional. Ketersediaan sumber daya alam merupakan faktor keberhasilan dalam kegiatan ekonomi guna menuju peningkatan pembangunan. Siswanto (2002:141) mengemukakan : “ Sumber daya alam, antara lain kekayaan alam seperti luas tanah, kesuburan tanah, keadaan iklim, cuaca dan hasil hutan, laut dan barang-barang tambang. Negara yang kaya sumber daya dalam mempunyai kemungkinan yang lebih besar dalam pertumbuhan perekonomiannya di sektor industri dibandingkan dengan negara yang miskin sumber daya alam”.
5. Sarana dan Prasarana.
Tersedia sarana dan prasarana sangat memungkinkan suatu daerah melaksanakan pembangunan. Sarana dan prasarana merupakan suatu faktor penting dalam pembangunan karena dapat berperan penting untuk kelancaran ekonomi masyarakat. Pembangunan sarana infrastruktur yang makin baik dapat mengurangi kendala dalam kegiatan perekonomian masyarakat. Apriadji (2004:215) menjelaskan bahwa :” Sarana merupakan alat yang digunakan masyarakat guna kelancaran kegiatan perekonomian. Sarana harus dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan guna melancarkan suatu kegiatan. Harus

didukung oleh pemeliharaan dan perbaikan yang baik, sehingga fisik sarana dan fasilitas tersedia dapat terjaga dan dapat digunakan pada saat-saat dirasakan penting, tersedianya sarana dan prasarana yang memadai dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Infrastruktur jalan adalah salah satu faktor yang mempengaruhi peningkatan kegiatan perekonomian suatu daerah, melancarkan transportasi, meningkatkan hubungan perdagangan antara satu daerah dengan daerah lainnya serta meningkatkan kegiatan perekonomian masyarakat.

Dengan demikian, dapat diketahui bahwa peranan Pemerintah Daerah dalam kegiatan perekonomian di sektor perindustrian sangat penting. Peran Pemerintah Daerah tersebut dapat dilaksanakan dengan cara pemberian keterampilan kepada masyarakat, pemberian kemudahan dalam mendapatkan permodalan, memberikan informasi tentang berbagai kelebihan sumber daya alam yang tersedia di daerah sehingga bisa menarik investor, serta penyediaan sarana dan prasarana serta infrastruktur yang dibutuhkan industri.

3. Metode Penelitian

3.1 Jenis Penelitian dan Sumber Data

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif yang menafsirkan berbagai peristiwa yang terjadi di lapangan yang dijadikan pengkajian lebih lanjut dengan membahas dan membandingkan dari pendapat ilmuwan sehingga dapat diambil suatu kesimpulan. Adapun yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah Pemerintah Kabupaten Bireuen yang terdiri atas Kepala Daerah dan Dinas-dinas dan instansi yang terkait dengan bidang perindustrian di Kabupaten Bireuen.

3.2. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif, yang menganalisis data yang telah terkumpul yang berhubungan dengan peranan pemerintah daerah dalam peningkatan sektor perindustrian. Analisis data dilakukan dengan mencatat, mengumpulkan, mengklasifikasikan, dan membandingkan serta mencari hubungan-hubungan yang berkaitan dengan kegiatan perekonomian di Kabupaten Bireuen.

4. Pembahasan

4.1 Peranan Pemerintah Daerah Terhadap Perkembangan Sektor Perindustrian di Kabupaten Bireuen

Dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan, maka Pemerintah Kabupaten Bireuen membangun berbagai industri di beberapa tempat yang bertujuan untuk menciptakan lapangan kerja dan memberi penghasilan kepada masyarakat. Peranan Pemerintah Kabupaten Bireuen dalam bidang perindustrian terfokus pada empat hal, yaitu :

1. Memfasilitasi bantuan dari berbagai pihak luar Kabupaten Bireuen, baik dari Pemerintah pusat maupun bantuan-bantuan dari Non Government organization (NGO) atau Lembaga Swadaya masyarakat (LSM) untuk membangun pusat-pusat industri maupun sarana dan prasarana di bidang perindustrian.
2. Mengundang pihak ketiga untuk mengelola industri yang telah dibangun tersebut.
3. Menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM), dengan cara memberikan pelatihan dan pembinaan kepada masyarakat untuk dapat memanfaatkan industri yang sudah dibangun tersebut.
4. Menyediakan bahan baku yang diperlukan oleh industri.

Setelah mendapatkan bantuan dari pihak luar untuk membangun industri, selanjutnya peranan pemerintah Kabupaten Bireuen dalam bidang perindustrian dapat dilihat dari kinerja Pemerintah Kabupaten Bireuen yang diawali dengan adanya pembangunan fisik berupa bangunan untuk sektor perindustrian, kemudian dilanjutkan pengadaan berbagai peralatan dan sarana penunjang, dan pemberian biaya perawatan terhadap peralatan yang dikembangkan, dan yang terakhir adalah menyediakan bahan baku untuk berbagai tahapan proses dalam bidang perindustrian.

Dari hasil wawancara dan pengamatan yang penulis lakukan, diketahui bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Bireuen tidak mempunyai target pendapatan untuk meningkatkan sektor perindustrian yang telah dibangun di Kabupaten Bireuen. Oleh karena itu tidak didapati adanya realisasi pendapatan

dari sektor industri yang dibangun oleh Pemerintah Kabupaten Bireuen. Hal ini terjadi karena Pemerintah Daerah Kabupaten Bireuen tidak mengalokasikan dana kepada sektor industri yang dibangun dari bantuan luar untuk melakukan aktifitas, karena untuk mengaktifkan suatu bidang perindustrian diperlukan dana dalam jumlah yang besar, sehingga tanpa adanya dana mengakibatkan tidak terjadinya kegiatan produksi, yang pada akhirnya sektor perindustrian yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bireuen tidak memberikan hasil sebagaimana yang diharapkan.

Dari penelitian dan wawancara, penulis mendapati bahwa peranan Pemerintah Kabupaten Bireuen dalam sektor perindustrian selama ini masih terkendala oleh berbagai permasalahan, yaitu :

1. Permodalan

Permodalan merupakan masalah klasik yang dihadapi oleh setiap unit usaha. Selama ini pemerintah kabupaten bireuen tidak mengalokasikan modal kepada industri yang sudah dibangun, sehingga tidak industri tersebut tidak bisa berproduksi. Modal sangat berpengaruh untuk terjadinya aktifitas faktor-faktor produksi yang berguna untuk meningkatkan kegiatan perekonomian di Kabupaten Bireuen. Modal merupakan faktor utama untuk menggerakkan berbagai aktifitas lainnya, sehingga apabila tidak tersedianya modal yang cukup maka kegiatan Industri di Kabupaten Bireuen tidak bisa terlaksana. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Prathama, S (2001 : 66-67) yang menjelaskan bahwa "Modal adalah alat atau barang yang dihasilkan dan dapat digunakan untuk menghasilkan barang selanjutnya. Modal tidak harus berupa uang tetapi dapat berupa barang yang produksi. Fungsi modal dalam ekonomi untuk menghasilkan dan meningkatkan atau memperluas produksi. Semakin banyaknya modal digunakan dalam produksi semakin banyak pula barang yang dapat dihasilkan".

2. Legalitas Usaha/Perusahaan.

Legalitas usaha merupakan hal penting bagi sebuah badan usaha, karena kelangsungan hidup, kontinyuitas kegiatan, dan pemasaran produk, kepercayaan pasar sangat dipengaruhi oleh masalah legalitas

tadi. Barbagi alasan disebutkan oleh para pelaku usaha, salah satunya adalah terlalu panjang prosedur yang harus mereka lalui untuk melegalkan usaha mereka. Pemerintah adalah yang paling bertanggung jawab dalam hal ini. Salah satu bentuk dukungan pemerintah seharusnya adalah memperpendek atau mempermudah prosedur pengurusan izin usaha, agar industri bisa semakin berkembang.

3. Pasar.

Dalam membangun industri di Kabupaten Bireuen, Pemerintah Kabupaten Bireuen kurang memperhatikan prospek pasar, akan tetapi cenderung lebih mendahulukan proyek pembangunan suatu bangunan seperti pada bangunan sektor perindustrian, tanpa memperhatikan keinginan pasar terhadap produk yang dihasilkan. Akibat yang ditimbulkan adalah produk yang dihasilkan kalah bersaing dipasar karena masyarakat sekarang sangat susah untuk percaya kepada produk dari kelompok usaha baru yang nama usahanya kurang populer dimasyarakat. Prathama (2001 : 47), menjelaskan bahwa salah satu faktor keberhasilan suatu industri adalah tersedianya pasar yang sesuai, sehingga setiap produk yang dihasilkan akan diminati oleh masyarakat. Suatu industri juga harus fleksibel terhadap kondisi pasar sehingga dapat menyesuaikan dengan keinginan konsumen.

4. Keterampilan (Skill)

Sebagian besar tenaga kerja yang bekerja pada sektor industri yang dibangun oleh Pemerintah Kabupaten Bireuen tidak memiliki keterampilan dan keahlian di bidang industri tersebut. Hal ini terjadi, karena selama ini masyarakat kurang begitu terlibat dalam perindustrian, sehingga mengakibatkan segala fasilitas yang ada tidak bisa dimanfaatkan untuk berproduksi. Jumlah penduduk sebagai sumber daya manusia yang bekerja di sektor-sektor industri yang memproduksi barang sangat menentukan dalam melaksanakan pembangunan. Semakin tinggi kualitas penduduk maka akan semakin meningkat pula produktivitasnya. Siswanto (2002:141), menjelaskan bahwa penduduk terdidik, terampil dan memiliki keahlian (skill) merupakan penduduk yang berkualitas dan mampu menyumbangkan

- tenaga dalam kegiatan pembangunan perindustrian.
5. Tenaga kerja yang berpindah.
Pada saat suatu perusahaan tidak mempunyai kepastian dalam perkembangannya, maka tenaga kerja yang mempunyai skill yang baik akan pindah ke perusahaan lain yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah Kabupaten Bireuen, sehingga menyebabkan sektor perindustrian tersebut semakin sulit berkembang. Tenaga Kerja juga akan berpindah apabila pemerintah tidak sanggup memberikan gaji/upah sebagaimana yang diharapkan. Tenaga kerja yang mempunyai skill atau kemampuan yang baik akan cenderung untuk pindah dari suatu unit usaha ke unit usaha yang lain yang bisa menjamin kelangsungan pekerjaannya dan besarnya upah yang akan didapatkannya. Tenaga kerja diartikan segala sesuatu kegiatan manusia, baik jasmani maupun rohani yang ditujukan untuk produksi. Secara umum, tenaga kerja yang bekerja dalam sektor perindustrian di tentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran tenaga kerja. Keseimbangan mekanisme pasar kerja akan menghasilkan tingkat upah dan tenaga kerja keseimbangan. Kenaikan dalam penawaran tenaga kerja yang di dorong oleh bertambahnya angkatan kerja perekonomian akan menyebabkan penawaran terhadap tenaga kerja akan bertambah, sehingga akan menyebabkan penurunan dalam tingkat upah dan kenaikan dalam penyerapan tenaga kerja (Prathama, S; 2001 : 66-67)
 6. Tidak adanya Studi Kelayakan (STK) pada masing-masing industri yang dibangun.
Sebagian industri yang dibangun tidak didahului dengan diadakannya suatu survey atau studi kelayakan. Dalam hal ini pemerintah Kabupaten Bireuen cenderung lebih mengutamakan mencari bantuan dari luar dalam jumlah yang besar tanpa memperhatikan manfaat dari industri yang akan dibangun tersebut. Manfaat yang akan didapatkan dengan melakukan survey atau studi kelayakan adalah akan diketahui adanya tingkat keberhasilan dari industri yang akan dibangun. Dalam studi kelayakan akan diketahui berbagai hal yang dibutuhkan untuk kelangsungan suatu

industri dengan memperhitungkan berbagai aspek sehingga industri yang akan dibangun bisa bermanfaat untuk jangka panjang, sehingga berguna untuk meningkatkan pembangunan ekonomi di Kabupaten Bireuen di masa yang akan datang. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Mulyadi (2002:166) "Pembangunan ekonomi merupakan suatu proses yang berlangsung dalam jangka panjang, maka penggunaan sarana dan prasarana serta sumber daya secara optimal harus memperhitungkan dinamika, baik kualitas maupun kualitas, komposisi pemanfaatan sarana dan prasarana juga mempengaruhi pembangunan ekonomi".

7. Tidak adanya aparatur yang profesional/ Sumber Daya Manusia yang kurang berkualitas. Sebagian besar aparatur pemerintahan di Kabupaten Bireuen tidak mempunyai pengalaman dan kemampuan dalam sektor perindustrian, sehingga sebagian industri di Kabupaten Bireuen, setelah dibangun, kemudian diambil alih oleh dinas-dinas yang tidak jelas dan aparat pemerintahan yang tidak berpengalaman dalam menangani industri. Akibatnya adalah industri tersebut menjadi terbengkalai. Kemampuan aparatur untuk mengelola industri yang sudah dibangun di Kabupaten Bireuen sangat berperan dalam menentukan keberhasilan suatu usaha. Aparat yang mempunyai sumber daya yang baik sangat diperlukan untuk menciptakan tata kelola perusahaan, manajemen yang baik dan kontrol yang bisa menjamin kelangsungan usaha pada sektor perindustrian. Untuk menciptakan aparatur yang profesional dan sumber Daya Manusia yang berkualitas bisa dilakukan dengan memberikan pembinaan dan pelatihan sehingga akan tercipta aparatur yang profesional yang bisa menjalankan roda perindustrian yang ada, sehingga bermanfaat untuk menciptakan lapangan kerja dan mengurangi pengangguran.

5. Kesimpulan

- 1) Peranan Pemerintah Kabupaten Bireuen dalam sektor perindustrian saat ini terfokus pada empat hal, yaitu memfasilitasi bantuan dari berbagai pihak luar Kabupaten Bireuen, baik dari

Pemerintah pusat maupun bantuan-bantuan dari Lembaga Swadaya masyarakat (LSM) untuk membangun pusat-pusat industri maupun sarana dan prasarana di bidang perindustrian, Mengundang pihak ketiga untuk mengelola industri yang telah dibangun tersebut, Menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM), dengan cara memberikan pelatihan dan pembinaan kepada masyarakat untuk dapat memanfaatkan industri yang sudah dibangun tersebut dan Menyediakan bahan baku yang diperlukan oleh industri.

- 2) Peranan Pemerintah Kabupaten Bireuen dalam sektor perindustrian selama ini masih terkendala oleh berbagai permasalahan, yaitu : Permodalan, Legalitas Usaha/Perusahaan, Pasar, keterampilan atau skill, Tenaga kerja yang berpindah, Tidak adanya Studi Kelayakan (STK) pada masing-masing industri yang dibangun, dan Tidak adanya aparatur yang profesional/Sumber Daya Manusia yang kurang berkualitas.
- 3) Dari berbagai permasalahan, dapat diketahui bahwa peranan Pemerintah Kabupaten Bireuen dalam sektor perindustrian masih belum maksimal sehingga sebagian industri yang telah dibangun tidak bisa dimanfaatkan sehingga belum memberikan nilai ekonomis bagi pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bireuen.

6. Rekomendasi

Pemerintah Kabupaten Bireuen harus lebih memperhatikan sektor perindustrian, dengan cara melakukan riset atau studi kelayakan sehingga setiap industri yang dibangun bisa dimanfaatkan. Pemda sebaiknya lebih memperhatikan kondisi sektor industri yang saat ini tidak berkembang. Kondisi ini terjadi karena sebagian permasalahan sektor perindustrian terjadi karena peran pemerintah yang belum maksimal. Untuk langkah selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Bireuen sebaiknya melakukan kerjasama dengan pihak ketiga, agar sektor perindustrian yang sudah dibangun bisa

berjalan dan memberi keuntungan kepada daerah.

Daftar Pustaka

- Apriadji (2004), *Penataan Infrastruktur dan Lingkungan*, Jakarta, percetakan Pustaka Press
- BPS, (2005), *Aceh Dalam Angka*, Badan Pusat Statistik NAD, Banda Aceh
- Hidayat, (2001), *Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan Industri*, Erlangga, Jakarta.
- Kurtz,L (2002), *Pengantar Bisnis*, Erlangga, Jakarta
- Mulyadi (2003), *Ekonomi Sumber Daya Manusia*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- Notoatmodjo (2004), *Pembangunan Ekonomi Masyarakat*, Jakarta, Pustaka Nasional.
- Pranoto (2001), *Perencanaan dan Pengendalian serta Peningkatan Usaha Masyarakat Menuju Adil dan Makmur*, Jakarta, Usaha Grafindo Persada
- Prathama, S (2001), *Ekonomi I* (Edisi Revisi), Jakarta, Gramedia Grafika
- Undang-Undang RI No. 9 tahun 1995 tentang Industri Kecil Informal”
- Undang-Undang RI No. 5 tahun 1984 Pasal 1 tentang perindustrian, definisi industri
- Undang-Undang No 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.
- Sadli (2001), *Pengembangan Investasi Swasta*, Jakarta, Pustaka Nasional.
- Samuelson (2003), *Pembangunan Ekonomi* (Terjemahan), Jakarta, UI-FE
- Sartika (2003), *Bantuan Fasilitas Pengelolaan Usaha Kecil Mikro*, Jakarta;Pustaka Press.
- Siswanto (2002), *Pembangunan Masyarakat di Pedesaan, Yogyakarta*, Usaha Nasional.
- Sofyan, Assauri (2004), *Manajemen Produksi*, lembaga Ekonomi Universitas Jogyakarta, Jakarta.

Riwayat Hidup Penulis :

Sonny M. Ikhsan M, SE., M.Si adalah Dosen pada fakultas Ekonomi Unimus, Lahir di Lhokseumawe, 30 Juni 1971. Menyelesaikan Sarjana Ekonomi di UNISBA Bandung, dan S2 FE Unsyiah. Menjabat sebagai PD I Fakultas Ekonomi Universitas Almuslim Bireuen-Aceh.